

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012-2016
BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

SKRIPSI



Ditulis Oleh :

Nama : Ali Sartono

Nomor Mahasiswa : 144214834

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Penulis

Ali Sartono

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012-2016
BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Oleh
Ali Sartono
144214834

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang berdasarkan konsep *Value For Money* yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang melalui website Pemerintah Daerah Kota Magelang. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Magelang dengan konsep *value for money* yaitu dilihat dari : rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 cukup ekonomis. Pemerintah Daerah Kota Magelang cukup sukses mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang efisien. Rasio efisiensi memperlihatkan hasil di rentang dari 90% - 100%. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat baik. Pemerintah Daerah Kota Magelang telah sukses dalam menentukan target penerimaan, dibuktikan dengan perolehan realisasi pendapatan yang lebih besar daripada anggaran pendapatannya. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, *Value For Money*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep *Value For Money*”.

Penelitian ini merupakan tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memenuhi syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi. Atas izin-Nya penulis telah menyelesaikan penelitian ini. Dalam realisasinya penulis sadar sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmatNya.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha.
3. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pikiran, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan, membimbing dan memberi masukan tugas akhir skripsi.
4. Bapak Ibu Dosen pengajar STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan bekal ilmunya.
5. Bapak Daliman dan Ibu Sumirah sebagai orangtua telah banyak memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Giyono dan Ibu Suheti sebagai mertua yang telah banyak memberikan doa dan dukungannya.

7. Novi Iriyanti dan Arkhan Zikri Ardhani selaku istri dan anak, yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk penulis.
8. Sunarto, Suyadi dan Firman selaku kakak dan adik yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai kekeliruan, karena itu penulis mengharapkan saran atau kritikan yang membangun, demi penyempurnaan laporan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Penulis

Ali Sartono
NIM. 144214834

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	7
2.1 Keuangan Daerah.....	7
2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	10

2.3 Pengukuran Kinerja Pemerintah	11
2.4 <i>Value For Money</i>	14
2.5 Penelitian Yang Relevan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Tempat Penelitian	24
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.4 Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Kota Magelang.....	28
4.1.1 Kondisi Geografis.....	28
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang	29
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Magelang	33
4.2 Pembahasan.....	36
4.2.1 Data Keuangan	36
4.2.2 Uji Rasio Ekonomis.....	37
4.2.3 Uji Rasio Efisiensi	40
4.2.4 Uji Rasio Efektivitas.....	43
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	47
5.1 Kesimpulan	47

5.2 Keterbatasan.....	47
5.3 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1.1 Bagan Pola Hubungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang	33
GAMBAR 4.1.2 Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang	34
GAMBAR 4.1.3 Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang	34
GAMBAR 4.1.4 Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang	35
GAMBAR 4.1.4 Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang	35

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

TABEL 4.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016.....	36
TABEL 4.2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016.....	37
TABEL 4.2.3 Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016.....	38
TABEL 4.2.4 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016.....	41
TABEL 4.2.5 Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016.....	44

STIE Widya Wiyaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 4.3.1 Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota	
Magelang Tahun Anggaran 2012-2016	40
GRAFIK 4.3.2 Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota	
Magelang Tahun Anggaran 2012-2016	42
GRAFIK 4.3.3 Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota	
Magelang Tahun Anggaran 2012-2016	46

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2012	51
Lampiran 2.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2013	53
Lampiran 3.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2014	55
Lampiran 4.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2015	57
Lampiran 5.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2016	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahannya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas antara lain : hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam mewujudkannya dilakukan dengan cara : meningkatkan kualitas pelayanan,

pemberdayaan masyarakat, terbentuknya sarana dan prasara di daerah yang memadai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalamnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan daerahnya dan pelayanan kepada sosial masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 108/2000 tentang pertanggungjawaban kepala daerah menyarankan agar setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan yang disampaikan antara lain : laporan realisasi anggaran, arus kas dan neraca. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa : laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah.

Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. (Kurniawati, 2016: 735)

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi konsep *value for money*. Partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. (Khikmah, 2014: 3-4)

Penerapan konsep *value for money* penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai : efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja

yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2009: 7)

Pemerintah Daerah Kota Magelang merupakan salah satu kota yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2015, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun permasalahan yang menyebabkan opini WDP dari BPK adalah masih seputar masalah pengelolaan aset, belanja operasi dan pengadministrasian. Masalah pengelolaan aset antara lain saldo aset tahun 2012 sebesar Rp 1,85 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya (<http://semarang.bpk.go.id/?p=2752>). Masalah pengelolaan operasi antara lain berupa kerugian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan kelebihan pembayaran gaji. Masalah pengadministrasian antara lain pengelolaan belanja barang dan pengelolaan belanja modal yang masih menumpuk di akhir tahun (<http://www.bpkp.go.id>). Pemerintah Daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2016 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan Tahun 2012 Rp 573.574.040.000, Tahun 2013 Rp 628.961.431.000, Tahun 2014 Rp 714.749.756.000, Tahun 2015 Rp 768.696.905.000 dan Tahun 2016 Rp 823.177.275.000 (<http://ppid.magelangkota.go.id>). Masyarakat

tentu menghendaki adanya pertanggungjawaban mengenai kinerja sektor publik, termasuk kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep *Value For Money*”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 masih belum memuaskan.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan pendekatan *Value For Money*?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang berdasarkan konsep *Value For Money* yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Pemerintah Kota Magelang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dari waktu ke waktu selama periode lima (5) tahun, sehingga terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode berikutnya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Kota Magelang.

STIE Widya Wivaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 KEUANGAN DAERAH

Menurut Mamesh dalam Halim (2004: 18), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah bisa berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah. Tetapi sepanjang kekayaan tersebut belum dimiliki dan dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD dan pengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen

keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah.

Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain. Hak-hak tersebut akan meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari keuangan daerah yaitu semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

Adapun sumber – sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah - pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

2.2 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Halim (2007: 330), bahwa : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

2.3 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH

Secara umum kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (Indra Bastian: 274). Menurut Mahsun (2006) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi atau organisasi dihubungkan dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi.

Menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

Menurut Robertson (2002) dalam Mahsun (2006), pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penilaian meliputi : informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh

pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Adapun pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja (Khikmah, 2014: 6).

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dilakukan melalui penilaian yang sistematis bukan hanya pada *input*, tetapi juga pada *output*, *benefit* dan *impact* (dampak) yang ditimbulkan. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan dasar yang *reasonable* untuk pengambilan keputusan dan melalui pengukuran kinerja akan dapat dilihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan dan dapat juga untuk mengukur kecenderungan dari tahun ke tahun (Khikmah, 2014: 6)

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat

diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.4 VALUE FOR MONEY

a. Definisi *Value for Money*

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya.

Value for Money menurut Mardiasmo (2009: 4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2005: 89) *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Value for Money* adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomis, efisiensi dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1. Ekonomis

Ekonomis adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input*

value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009: 4). Indikator ekonomis merupakan indikator tentang *input*. Pertanyaan yang diajukan adalah “apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis?” (Bastian, 2006: 78).

2. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu (Bastian, 2006: 280). Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 4).

3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2006: 280). Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009: 134).

b. Indikator *Value for Money*

Tuntutan masyarakat dalam *Value for Money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009: 130). Mardiasmo (2009) juga membagi indikator *Value for Money* menjadi dua yaitu: Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

c. Manfaat Implementasi *Value for Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009: 130).

Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain: meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2009: 7).

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

d. Langkah-langkah pengukuran *Value for Money*

1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Dimana rasio ekonomis merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Mardiasmo (2009: 4) ekonomis adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauhmana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Indra Bastian (2006: 280) mencontohkan biaya pembangunan rumah sakit dapat dikatakan ekonomis jika biaya yang digunakan dalam pembangunan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi belanja lebih kecil daripada target belanja yang ditetapkan.

2. Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2009: 133) efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Sebagaimana dikatakan Halim (2007) bahwa efisiensi dalam rasio efisiensi berarti melihat perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan, dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah harus semakin cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien ataukah tidak (Amalia, 2015:35).

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa

besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 134). Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

2.5 PENELITIAN YANG RELEVAN

- a. Afiati (2011), yang berjudul “Analisis *Value For Money* Pada Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep pengukuran kinerja menggunakan *value for money* untuk menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan, khususnya laporan realisasi anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis BAPPEDA Kabupaten Semarang adalah kurang baik, rasio efisiensi adalah sangat baik dan rasio efektifitas baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan BAPPEDA Kabupaten Semarang menjalankan 11 program pada tahun 2009 sehingga pada tahun 2010 program-program tersebut tidak dilaksanakan. Di sisi lain penggunaan dana yang tidak melebihi anggaran juga turut mempengaruhi.

- b. Andriani (2013), yang berjudul “Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip *Value For Money* Pemerintah Kota Batu”.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah ringkasan laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Batu periode 2005-2009. Hasil Penelitian berdasarkan teknik pengukuran *value for money* menunjukkan: rasio ekonomis menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu ekonomis karena dalam merealisasikan pengeluarannya rasionya kurang dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dari realisasi pendapatannya. Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu secara umum cukup efektif karena hasil rasionya lebih dari 100%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu ditinjau dari konsep *value for money* sudah baik karena telah memenuhi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

- c. Khikmah (2014), yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for Money*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *value for money* yang berdasarkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran dan Pengeluaran Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan periode 5 tahun yaitu tahun 2009-2013.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Rasio ekonomis menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan efektif karena menghasilkan rasio lebih dari 100%.

- d. Sari (2014), yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip *Value For Money* yaitu dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan laporan Anggaran dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013.

Hasil penelitian dari penelitian ini dilihat dari perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada kategori ekonomis. Rasio efisiensi Kabupaten Sumenep berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektivitas kinerja Kabupaten Sumenep

cenderung efektif. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik. Hasil perhitungan rasio dari tahun 2010 sampai dengan 2013 cenderung berada pada kategori ekonomis, efisien dan efektif.

- e. Khalikussabir (2017), yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* yaitu dengan pengukuran 3E (Ekonomis, efisiensi dan efektivitas) pada dinas PU Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data realisasi pencapaian keuangan dinas PU (Cipta Karya, Bina Marga dan Perairan) Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014-2016.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pada tahun 2014-2016 analisis *value for money* dari persepektif ekonomis pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan Perairan diperoleh bahwa Dinas PU Bina Marga menempati predikat nilai sangat ekonomis yang paling besar selama 3 tahun dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan. Analisis *value for maney* dari persepektif efektifitas pekerjaan, diperoleh bahwa Dinas PU yang memiliki kinerja efektif hanya Cipta Karya selama tahun 2014-2015. Tahun 2016 PU Bina Marga yang paling efektif dalam pekerjaannya, sedangkan Pengairan tidak

ada yang efektif. Analisis *value for maney* dari persepektif efisiensi, diperoleh bahwa Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 -2015 memperoleh hasil yang sangat efisien. Dinas PU Pengairan menjadi yang terbaik di tahun 2014. Dinas PU Cipta Karya menunjukan rasio yang terbaik pada tahun 2015 – 2016.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. TEMPAT PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Magelang.

3.2 SUMBER DAN JENIS DATA

Data adalah suatu kenyataan yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang melalui website Pemerintah Daerah Kota Magelang.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- a. Studi Pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan menyeluruh tentang mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan prinsip *value for money*.

b. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016.

3.4. METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dalam bentuk studi kasus yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan konsep *value for money* yaitu dilihat dari : Rasio ekonomis, Rasio efisiensi, dan Rasio efektivitas

a. Rasio ekonomis

Rasio ekonomis berkaitan dengan perolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Rasio ekonomis merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukuran ekonomis melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan.

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan, kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian. Menurut Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007 (Afiati, 2011) apabila kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan tidak ekonomis, 90% - 100% adalah kurang ekonomis, 80% - 90% adalah cukup ekonomis, 60% - 80% adalah ekonomis dan di bawah dari 60% adalah sangat ekonomis. Semakin kecil rasio ekonomis berarti rasio kinerja akan semakin baik.

b. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatam}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan, kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian. Menurut Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007 (Afiati, 2011) apabila kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan di bawah dari 60% adalah sangat efisien. Semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik.

c. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatam}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan, kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian. Menurut Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007 (Afiati, 2011) apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Magelang merupakan kota yang terletak di Pulau Jawa dengan luas 18,12 km². Secara geografis kota Magelang terletak pada 110°12'30"-110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'28"-7°30'9" Lintang Selatan. Kota Magelang terletak pada posisi strategis yaitu berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo. Di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi Dieng. Letak strategis Kota Magelang juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kota Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang lebih 380 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5°-45°, sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan Sungai Progo disisi barat dan Sungai Elo disisi timur. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai

daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sebesar +7,10 mm/ th.

Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- b. Sebelah timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
- d. Sebelah barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang

a. Visi

Visi pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan adalah “Magelang sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”. Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Kota Jasa

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik : masyarakat sejahtera dalam financial, kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum), visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

3. Kota Cerdas

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun complain dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas :

- a. *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance* dan ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

- b. *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT.
 - c. *Smart Economy* yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce* dan ekonomi kreatif.
 - d. *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT dan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
 - e. *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat.
 - f. *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
4. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi. Perwujudan masyarakat sejahtera dilakukan melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan, menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan, tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

b. Misi

Berdasarkan Visi Kota Magelang tersebut ditetapkan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

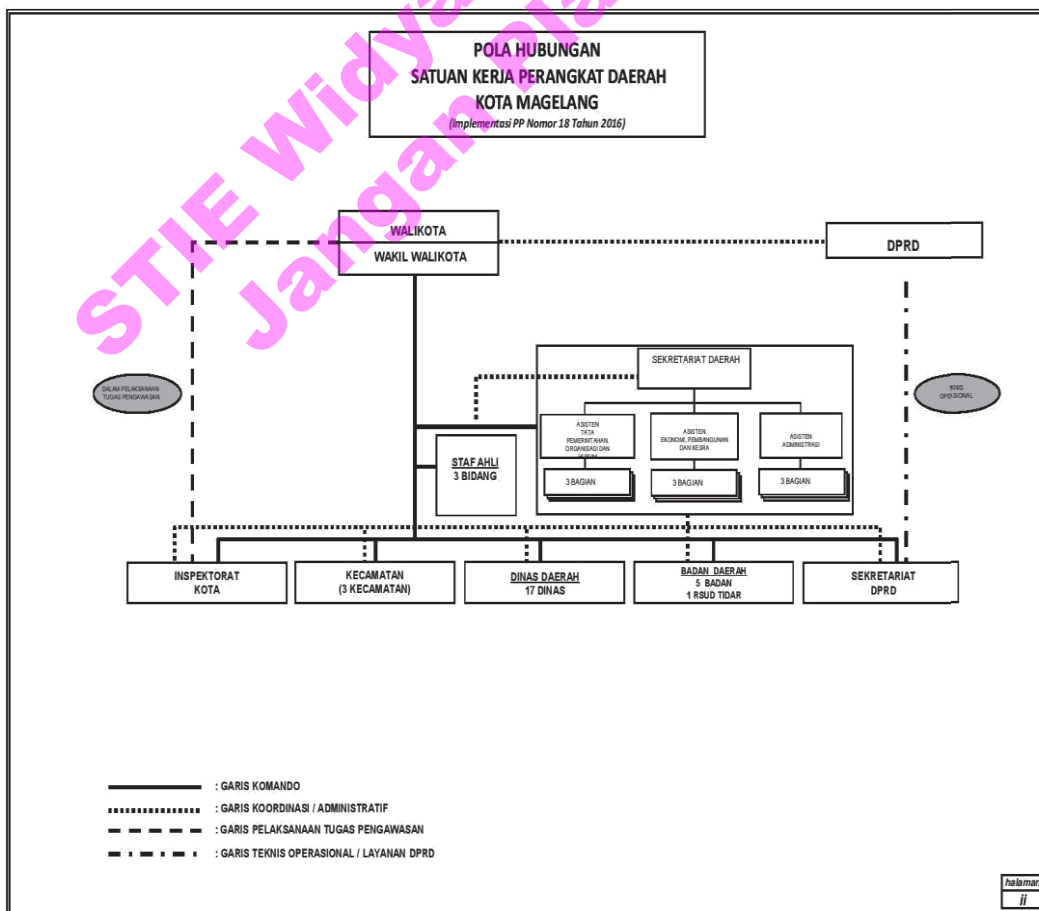
1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintah daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

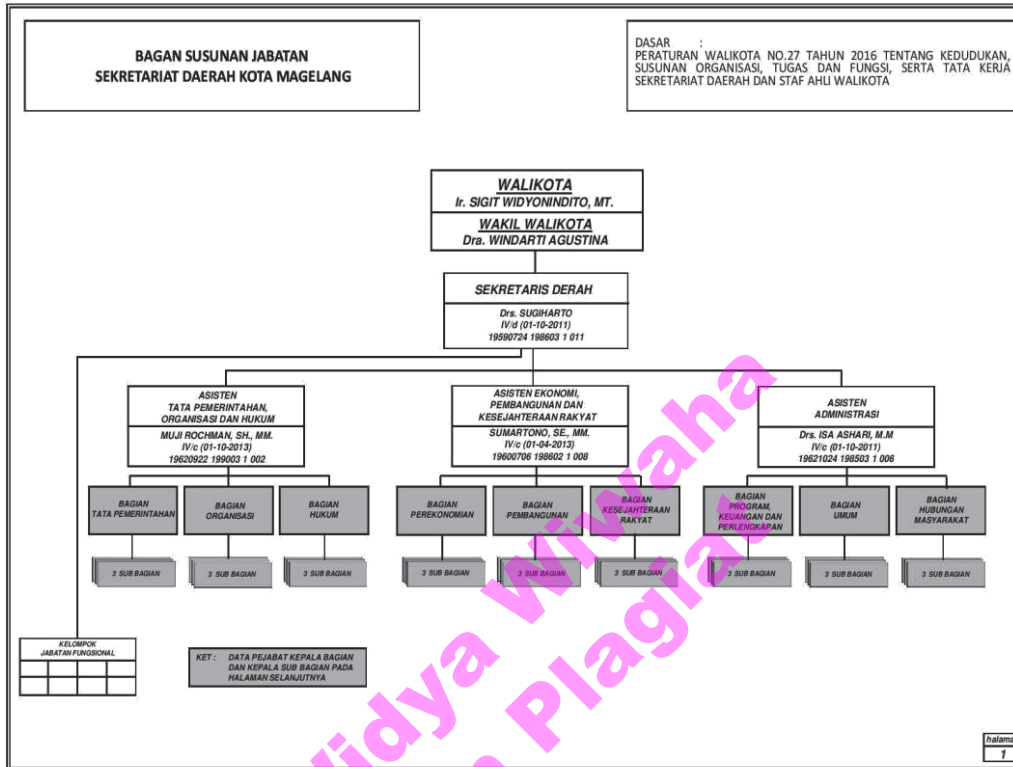
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Magelang

Pola hubungan satuan kerja perangkat daerah kota Magelang adalah sebagai berikut :

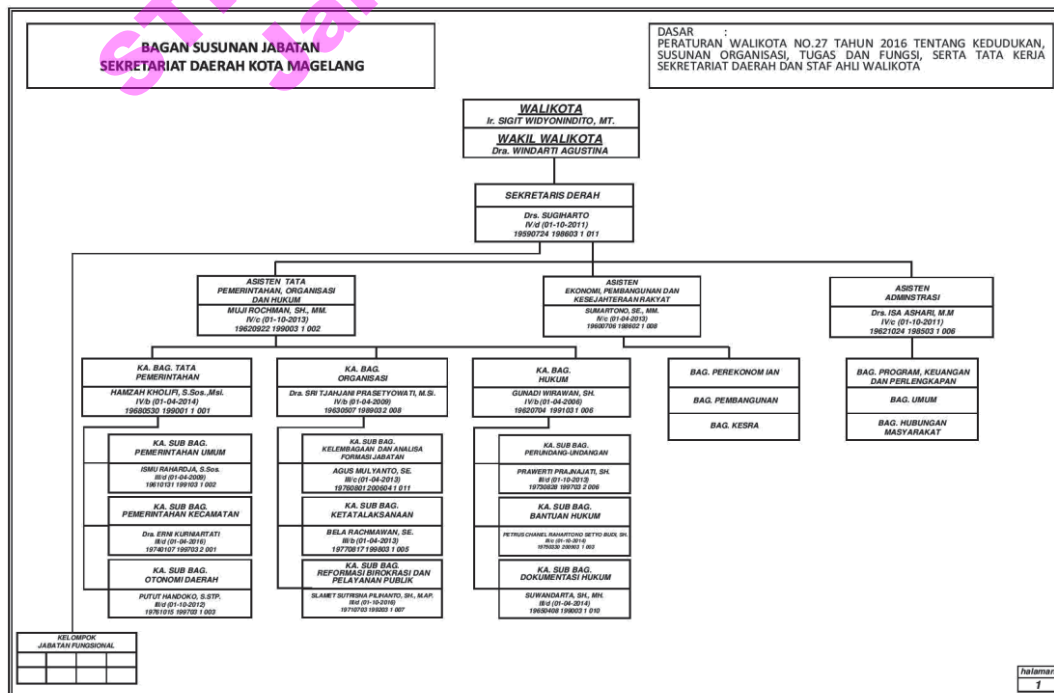
Gambar 4.1.1
Bagan Pola Hubungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang



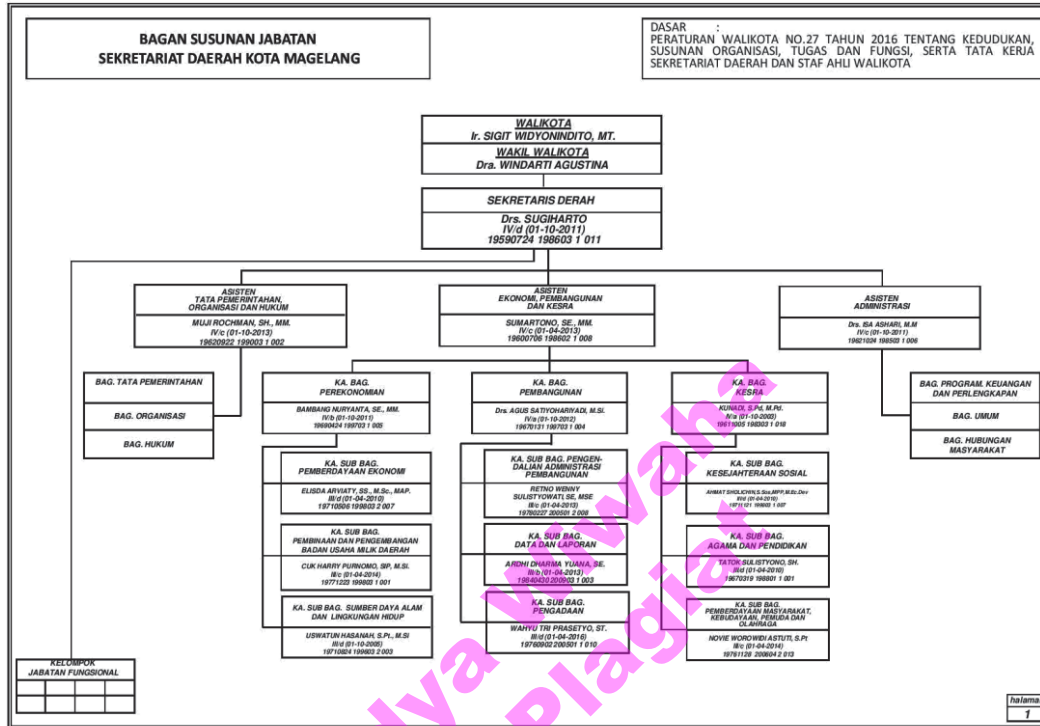
Gambar 4.1.2
Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang



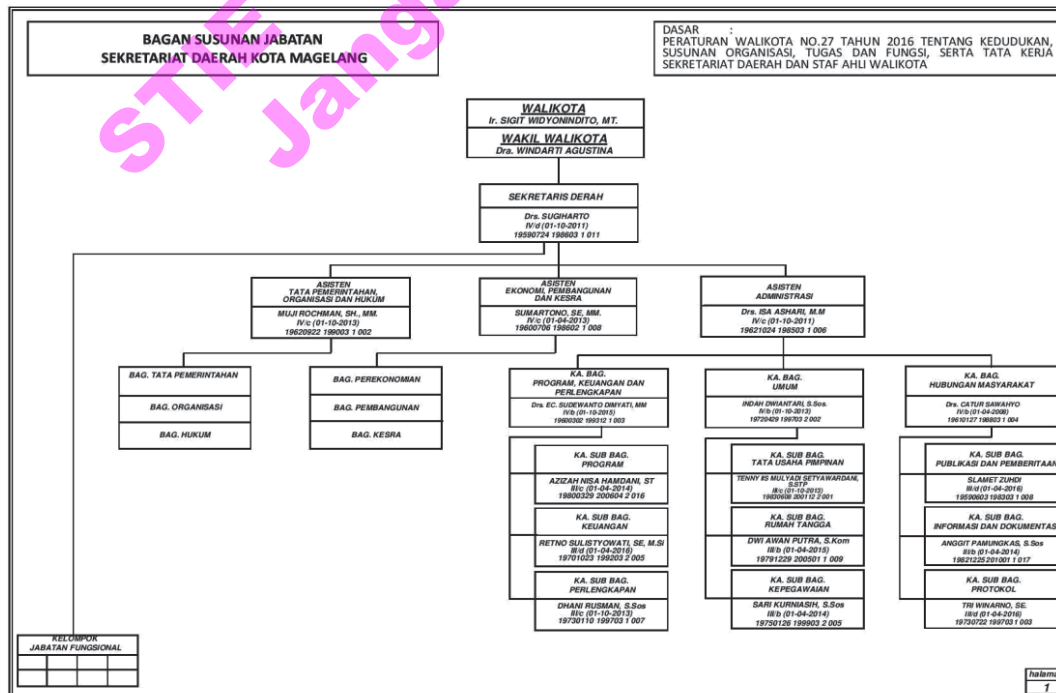
Gambar 4.1.3
Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang



Gambar 4.1.4
Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang



Gambar 4.1.5
Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Daerah Kota Magelang



Sumber : www.magelangkota.go.id

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1 Data Keuangan

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2012-2016. Data laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Magelang dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Pemerintah Kota Magelang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012-2016 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan	573.574	628.961	714.750	768.697	823.177
	Pendapatan Asli Daerah	82.457	96.303	124.432	152.806	197.465
	Pendapatan Transfer	491.117	532.659	582.639	615.891	625.712
	Lain - lain pendapatan daerah			7.678	-	-
2	Belanja	642.032	734.108	816.939	924.541	1.016.826
	Belanja Operasi	496.111	550.154	633.242	693.554	722.822
	Belanja Modal	133.152	166.818	156.470	188.977	246.509
	Belanja Tak Terduga	12.769	17.136	27.228	42.010	47.494
3	Transfer		-		561	642
	Surplus (Defisit)	(68.458)	(105.146)	(102.189)	(156.405)	(194.290)
4	Pembiayaan	68.458	105.146	102.189	172.914	194.290
	Penerimaan Daerah	74.827	111.794	109.804	179.448	201.377
	Pengeluaran Pembiayaan	6.369	6.648	7.615	6.534	7.087
	Pembiayaan Netto	68.458	105.146	102.189	172.914	194.290
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	16.509	-

Sumber : PPID Kota Magelang data sekunder, diolah 2017

Tabel 4.2.2
Pemerintah Kota Magelang
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012-2016 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan	579.717	634.760	735.116	781.336	840.043
	Pendapatan Asli Daerah	91.315	107.740	164.928	186.677	220.316
	Pendapatan Transfer	488.403	527.020	561.181	594.627	618.962
	Lain - lain pendapatan daerah			9.008	31	764
2	Belanja	536.349	630.851	682.224	735.861	871.217
	Belanja Operasi	456.383	487.995	554.495	593.485	648.586
	Belanja Modal	79.136	142.589	127.623	141.309	221.924
	Belanja Tak Terduga	830	267	106	1.067	707
3	Transfer				480	642
	Surplus (Defisit)	43.369	3.909	52.892	44.995	(31.817)
4	Pembiayaan	68.206	105.675	102.827	156.232	194.161
	Penerimaan Daerah	74.575	112.323	110.442	162.766	201.248
	Pengeluaran Pembiayaan	6.369	6.648	7.615	6.534	7.087
	Pembiayaan Netto	68.206	105.675	102.827	156.232	194.161
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	68.206	109.584	155.719	201.227	162.345

Sumber : PPID Kota Magelang data sekunder, diolah 2017

Tabel 4.2.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 di Pemerintah Daerah Kota Magelang. Total pendapatan mengalami peningkatan karena pendapatan asli daerah, pendapatan transfer selalu mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

4.2.2 Uji Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis berkaitan dengan perolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Rasio ekonomis merupakan perbandingan

antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukuran ekonomis melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan. Menurut Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007 (Afiati, 2011) apabila kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan tidak ekonomis, 90% - 100% adalah kurang ekonomis, 80% - 90% adalah cukup ekonomis, 60% - 80% adalah ekonomis dan di bawah dari 60% adalah sangat ekonomis.

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Berikut ini tabel pengukuran rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kota Magelang periode tahun 2012 – 2016 :

Tabel 4.2.3
Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012 – 2016

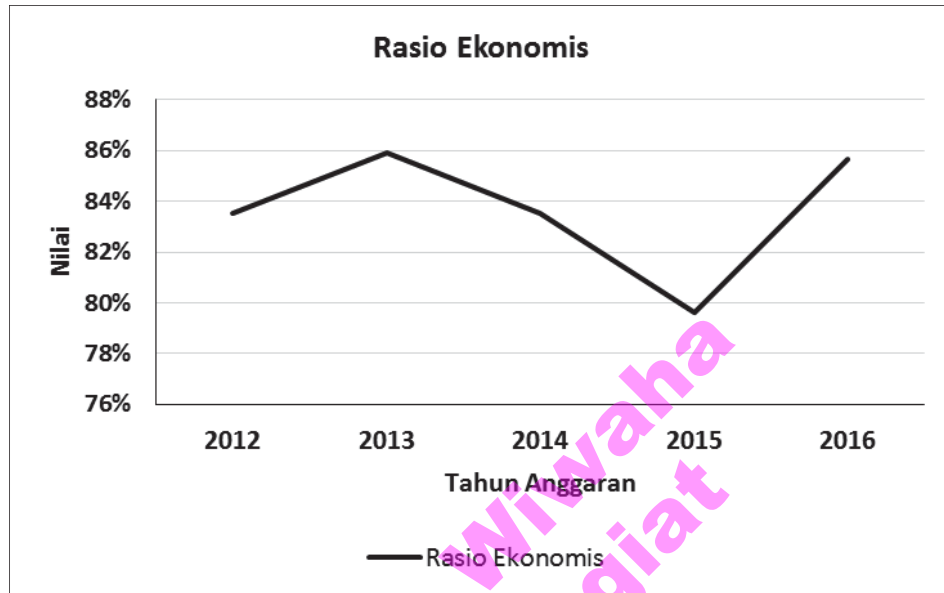
No	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomis
1	2	3	4	5 = 3/4*100%
1	2012	536.348.689.402	642.032.128.000	83,54%
2	2013	630.850.717.357	734.107.689.000	85,93%
3	2014	682.223.870.407	816.938.971.000	83,51%
4	2015	735.860.862.150	924.541.456.000	79,59%
5	2016	871.217.302.103	1.016.825.539.000	85,68%

Sumber : Data Sekunder, Diolah 2017

Tabel 4.2.3 menggambarkan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Magelang berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomis. Rasio ekonomis mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2012-2016. Tahun anggaran 2012 rasio ekonomis mencapai 83,54 %. Tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan 2,39%. Tahun anggaran 2014 mengalami penurunan 2,42%. Tahun anggaran 2015 mengalami penurunan 3,92%. Tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan 6,09%. Tahun Anggaran 2012 – 2016 rasio ekonomis rata-rata berada rentang dari 80% - 90%. Pemerintah daerah kota Magelang dikatakan cukup ekonomis berdasarkan hasil uji ekonomis yang menunjukkan rentang dari 80% - 90%. Pemerintah daerah kota magelang menggunakan disiplin anggaran pada saat memulai pelaksanaan program pemerintah dan pada akhir masa pelaksanaannya. Program-program pemerintah tidak terjadi pemborosan pada penggunaan belanja operasi. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja operasional lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa tidak terjadi pemborosan. Tahun anggaran 2015 menjadi yang terbaik karena menghasilkan rasio ekonomis 79,59% dan dikatakan ekonomis.

Grafik pengukuran kinerja *value for money* untuk rasio ekonomis dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Grafik 4.3.1
Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012 – 2016



Sumber : Data Sekunder, Diolah 2017

Grafik 4.3.1 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan atau penurunan rasio ekonomis. Tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami penurunan. Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan.

4.2.3 Uji Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007 (Afiati, 2011) apabila kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90%

adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan di bawah dari 60% adalah sangat efisien.

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini tabel pengukuran rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Magelang periode tahun 2012 – 2016 :

Tabel 4.2.4
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012 – 2016

No	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4*100%
1	2012	536.348.689.402	579.717.446.829	92,52%
2	2013	630.850.717.357	634.759.985.140	99,38%
3	2014	682.223.870.407	735.116.114.40	92,80%
4	2015	735.860.862.150	781.335.799.509	94,18%
5	2016	871.217.302.103	840.042.626.525	103,71%

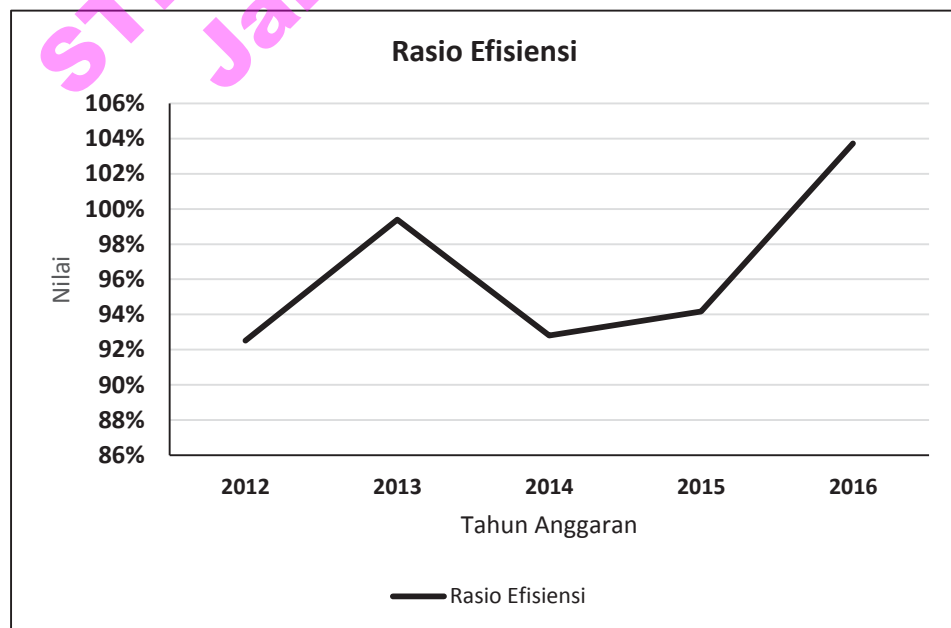
Sumber : Data Sekunder, Diolah 2017

Dari tabel 4.2.4 menggambarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari rasio efisiensi. Rasio efisensi mengalami kenaikan atau

penurunan dari tahun 2012-2016. Tahun anggaran 2012 rasio efisien mencapai 92,52 %. Tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan 6,86%. Tahun anggaran 2014 mengalami penurunan 6,58%. Tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan 1,38%. Tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan 9,53%. Tahun Anggaran 2012 – 2016 rasio efisiensi rata-rata berada rentang dari 90% - 100%. Pemerintah daerah kota Magelang dikatakan kurang efisien berdasarkan hasil uji ekonomis yang menunjukkan rentang dari 90% - 100%. Pemerintah daerah kota Magelang cukup mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai.

Grafik pengukuran kinerja *value for money* untuk rasio efisiensi dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Grafik 4.3.2
Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012 – 2016



Sumber : Data Sekunder, Diolah 2017

Berdasarkan grafik 4.3.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan atau penurunan rasio efisiensi. Tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami penurunan. Tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan.

4.2.4 Uji Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Menurut Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007 (Afiati, 2011) apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif

Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatam}} \times 100\%$$

Berikut ini tabel pengukuran rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kota Magelang periode tahun 2012 – 2016 :

Tabel 4.2.5
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012 – 2016

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas
1	2	3	4	$5 = 3/4 * 100\%$
1	2012	579.717.446.829	573.574.040.000	101,07%
2	2013	634.759.985.140	628.961.431.000	100,92%
3	2014	735.116.114.407	714.749.756.000	102,85%
4	2015	781.335.799.509	768.696.905.000	101,64%
5	2016	840.042.626.525	823.177.275.000	102,05%

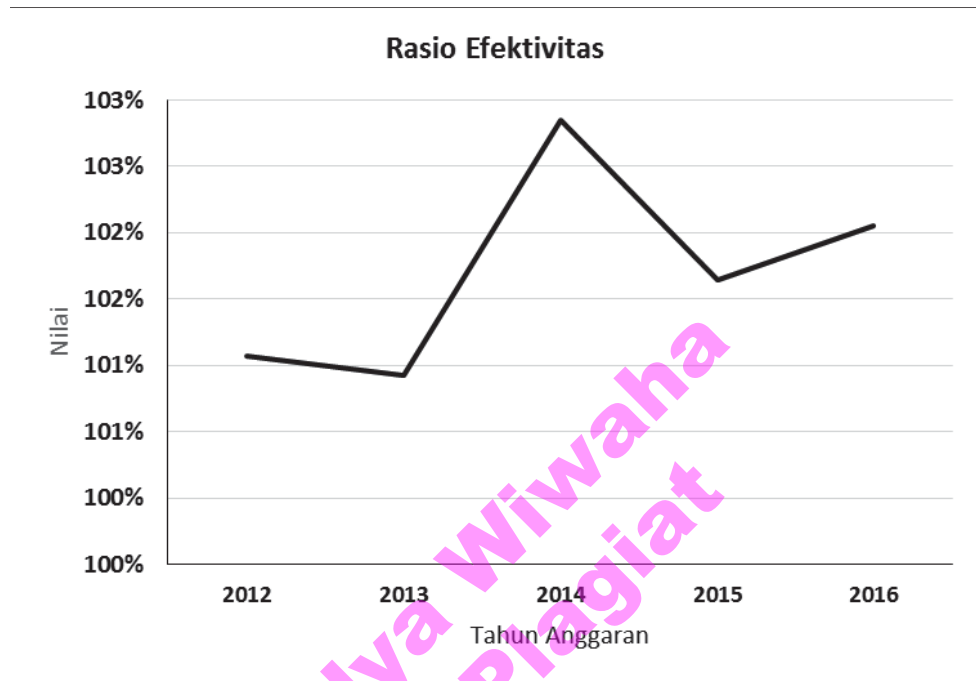
Sumber : Data Sekunder, Diolah 2017

Dari tabel 4.2.5 menggambarkan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Magelang berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari rasio efektivitas. Rasio efektivitas mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2012-2016. Tahun anggaran 2012 rasio efektivitas mencapai 101,07%. Tahun anggaran 2013 mengalami penurunan 0,15%. Tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan 1,93%. Tahun anggaran 2015 mengalami penurunan 1,21%. Tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan 0,41%. Tahun Anggaran 2012 – 2016 rasio efektivitas rata-rata berada rentang di atas 100% sehingga pemerintah daerah kota Magelang dikatakan sangat efektif . Tahun anggaran 2014 menjadikan yang terbaik dilihat dari segi efektivitas karena menghasilkan rasio efektivitas 102,85%.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang dikatakan baik dari segi efektivitas bukan hanya dilihat dari meningkatnya persentase rasio efektivitas. Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah berhasil melaksanakan program-program dengan baik untuk meningkatkan kinerja. Program yang dilakukan antara lain upaya peningkatan pajak daerah. Pajak daerah yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, parkir, sarang burung, pajak bumi bangunan dan air tanah. Langkah-langkah yang dilakukannya antara lain studi terhadap potensi pendapatan asli daerah, pendataan dan penilaian terhadap potensi pendapatan asli daerah, merevisi dan mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan pajak retribusi yang tidak sesuai lagi. Pemerintah Daerah Kota Magelang melakukan penegakan hukum agar wajib tertib dalam membayar pajak. Wajib pajak diingatkan mengenai kewajibannya membayar pajak, diberikan surat tagihan dan teguran jika terjadi keterlambatan membayar pajak.

Grafik pengukuran kinerja *value for money* untuk rasio efektivitas dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

Grafik 4.3.3
Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012 – 2016



Sumber : Data Sekunder, Diolah 2017

Berdasarkan grafik 4.3.3 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan atau penurunan rasio efektivitas. Pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013 mengalami penurunan. Tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan sedangkan tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang berdasarkan konsep *value for money* diperoleh bahwa rasio ekonomis tahun 2012-2016 cukup ekonomis. Hal ini dibuktikan dengan rasio ekonomis yang berada di rentang dari 80% - 90%. Berdasarkan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun 2012-2016 kurang efisien. Rasio efisiensi memperlihatkan hasil di rentang dari 90% - 100%. Berdasarkan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun 2012-2016 sangat efektif. Rasio efektivitas selalu menunjukkan hasil lebih dari 100%. Realisasi pendapatan selalu lebih besar daripada anggaran pendapatannya. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik.

5.2 KETERBATASAN

Penelitian ini hanya dilakukan dalam satu kota, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kota lainnya. Rentang waktu penelitian hanya dilakukan pada tahun 2012-2016 (5 tahun).

5.3 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya antara lain :

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan di beberapa kota yang ada di Indonesia.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jangka waktu penelitian.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Tri Astuti (2011). *Analisis Value For Money Pada Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Amalia, Putri Riskitta (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep Value For Money Di Pemerintah Kota Ternate*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Manado: Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
- Andriani, Sri (2013). “Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu”. *Jurnal Akuntansi UIN Malang*. Vol. 3 No 1.
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khikmah, Alayyah (2014). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value for Money”. *Jurnal Akuntansi UNESA*, Hal. 3-4.
- Khalikussabir, Khalikussabir (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)”*. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen FE Unisma*, Vol. 6, No. 3.
- Kurniawati, Nova (2016). “Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Bantul”. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, Vol. 3, No. 1.
- Liando, Harry Saputra (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money”. ISSN 2303-1174. *Jurnal EMBA*, Vol. 2, No. 3, Hal 1686-1694.
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun (2006). *Penilaian Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia (2000). *Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah*.

Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Sari, Nindi Cahya Feriska (2014). "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)". *Jurnal Akuntansi UNESA*.

<http://www.magelangkota.go.id>

<http://ppid.magelangkota.go.id>

<http://dppkd.magelangkota.go.id>